

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Jateng

BPK RI Ungkap Banyak Permasalahan Atas Pengelolaan Keuangan Desa

<http://metrotimes.news/breaking-news/bpk-ri-ungkap-banyak-permasalahan-atas-pengelolaan-keuangan-desa/>

MetroTimes(Semarang)Banyaknya permasalahan atas pengelolaan Keuangan Desa khususnya yang terjadi di hampir seluruh Desa di Provinsi Jawa Tengah terungkap dalam materi yang di sampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan(KALAN) BPK RI Provinsi Jawa Tengah , Hery Subuwu S.E., Ak, MPA, CIA, CFE, CA dalam acara Media workshop dengan Tema "Mekanisme Pemberian Opini atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Desa".



Kepala Perwakilan(KALAN) BPK RI Provinsi Jawa Tengah , Hery Subuwu S.E., Ak, MPA, CIA, CFE, CA saat memberikan pemaparan

Menurut Kapanal BPK RI Provinsi Hery Subuwu, salah satu permasalahan yang ada dalam pengelolaan Keuangan Desa adalah Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Dana Transfer yang Tidak Sesuai Ketentuan. Hal tersebut antara lain terlihat dari belum di buatnya Speksifikasi Teknis oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atas Barang dan Jasa yang akan diadakan.

Lebih lanjut TPK juga belum melakukan Negosiasi yang di tuangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, khususnya untuk transaksi antara Rp. 50 juta hingga Rp. 200juta. Selain

itu Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebuah pekerjaan juga di susun hanya berdasarkan Harga Indeks Kabupaten, bukan berdasarkan harga setempat atau harga pasar terdekat dari desa.

Permasalahan lain dalam pengelolaan Keuangan Desa yang juga di ungkap Kapanal Prov Jateng, Hery Subuwu yakni adanya Realisasi Belanja Desa yang belum di dukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang lengkap. Selain itu, Bendahara Desa belum melakukan penyetoran Pajak dan Pemungutan Pajak atas Transaksi Pengeluaran.

Hery menjelaskan perihal pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Desa meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dimana Pengelolaan Keuangan Desa karena Keuangan Desa termasuk dalam Kategori Keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD.Untuk itu Hery mengingatkan agar setiap Kepala Desa wajib menata Laporan Keuangan Desa mereka "Karena Dana Desa bukan Uang Nenek Moyangnya, jadi Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa harus sesuai ketentuan, Peraturan dan perundang-undangan yang harus di taati "Tegas Hery selaku Kapanal BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.



Kasubag Humas, Athur Saragih Bersama Kepala Perwakilan(KALAN) BPK RI Provinsi Jawa Tengah , Hery Subuwu S.E., Ak, MPA, CIA, CFE, CA menyapa Jurnalis yang hadir dalam acara Media Workshop

membangun sinergi dan kesamaan persepsi antara BPK dan pihak Media, dalam upaya bersama untuk lebih mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.



Kepala Perwakilan(KALAN) BPK RI Provinsi Jawa Tengah , Hery Subuwu S.E., Ak, MPA, CIA, CFE, CA dan Jajarannya Foto Bersama Awak Media yang hadir dalam Acara Media Workshop

menyempatkan diri Foto bersama seluruh awak Media yang hadir dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Hery menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan pemerintah merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. Selain pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PDTP).Berdasarkan aturan yang ada , setidaknya terdapat 5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Efektif, dan Efisien.

Media Workshop itu sendiri dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama yang Efektif antara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Insan Media yang Di Semarang dan Sekitarnya. BPK sangat menyadari peran penting media dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat. Pelaksanaan peran kegiatan-kegiatan sejenis diharapkan dapat

Kegiatan Media workshop sendiri di Moderatori oleh Kasubag Humas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Athur Saragih Bersama Kepala Sub Audit Jateng IV Ahmad Adib Susilo, SE, MSi, Ak salah satu Pejabat Struktural di Pemeriksaan yang membawahi Wilayah Pantura Bagian Barat. Dan di laksanakan Rabu,(18/10) bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah yang di ikuti sedikitnya 70 Reporter dan wartawan dari berbagai Media Nasional maupun Media Lokal baik Online, TV dan Koran. Selain Sesi tanya Jawab Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah juga